



Fenomena Politik Dinasti Di Kalimantan Timur

Herdiansyah Hamzah

Politik Dinasti?

- T Ada yang menyebutnya sebagai **dinasti politik** (*political dynasty*), tetapi tidak sedikit juga yang menyebutnya dengan istilah **keluarga politik** (*political family*).
- T Dalam beberapa kasus, **dinasti politik** (kata benda) merujuk kepada entitas politik yang sudah mapan (*established*), sedangkan **politik dinasti** (kata sifat) merujuk kepada pilihan pendekatan yang digunakan oleh entitas politik yang baru muncul (*emerging*).
- T Jemma Purdey (2016), **Dinasti politik** mengacu pada kemampuan sebuah keluarga untuk **mewarisi** dan **mengakumulasi kekuasaan** dan **kekayaan** dari satu generasi ke generasi berikutnya dan seringkali berfungsi di berbagai sistem politik dan lintas waktu (McCoy, 2002; Teehankee, 2001).
- T Park Seung Woo (2008), **genealogi** keluarga politik tidak hanya diidentifikasi berdasarkan hubungan sedarah, tetapi juga bisa berdasarkan kelompok kekerabatan, pertemanan, hingga rekan sekerja.

Situasi Global

- T Menurut **Ernesto Dal Bó dkk (2007)**, di Amerika Serikat, prevalensi dinasti di kalangan legislator memang tinggi ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain.
- T **Farida Jalalzai dan Meg Rincker (2018)**, menemukan fakta bahwa satu dari sepuluh pejabat eksekutif di seluruh dunia, merupakan milik keluarga politik (*belonging to a political family*).
- T Sebanyak 119 orang atau sekitar 12% dari total 1.029 pejabat eksekutif tersebut, memiliki relasi kekeluargaan dengan klan politik tertentu.
- T Berdasarkan wilayah, Eropa dan Amerika Latin memiliki persentase tertinggi, yakni sekitar 13%, disusul Asia sekitar 11%, dan Afrika sub-Sahara sekitar 9%.

Situasi Global

(Lanjutan....)

Executive Office Holders by Region

Region	Number (%)	Office Holders With Family Ties	Percent Office Holders With Family Ties
Europe	417 (41)	54	13
Sub-Saharan Africa	312 (30)	29	9
Asia	204 (20)	23	11
Latin America	88 (9)	11	13
North America	8 (0)	2	25
Total	1029 (100)	119	12

Sumber : *Farida Jalalzai dan Meg Rincker (2018)*

Situasi di Indonesia

- T Di Indonesia, politik dinasti muncul dan berkembang biak dalam wujud sistem *patrimonial*, yakni sistem regenerasi politik yang ditentukan berdasarkan garis genealogis atau pewarisan. Seseorang ditunjuk menjadi pemimpin hanya atas dasar kekerabatan, bukan karena kemampuan dan kapabilitasnya berdasarkan mekanisme *merit system*.
- T Sistem *patrimonial* mengalami transformasi untuk beradaptasi dengan perkembangan politik modern. Kalau dulu pewaris ditunjuk secara langsung, maka hari ini proses keterpilihan itu didesain melalui mekanisme *legal formal*, baik melalui “*partai politik*” maupun lembaga-lembaga publik strategis lainnya.
- T Kenapa harus **partai politik**? Menurut Ernesto Dal Bó *dkk (2007)*, ketika suatu partai dengan aman mengontrol suatu negara, mereka yang ada di dalamnya akan dengan mudah mengendalikan dan mengontrol dukungan kepada calon yang berhubungan dengan keluarga atau relasi sosialnya.

Situasi di Indonesia

(Lanjutan....)

- T Secara normative, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya **Nomor 33/PUU- XIII/2015**, memberikan landasan *legal formal* terhadap keberadaan politik dinasti dalam Pilkada.
- T Putusan MK ini didasari oleh pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), “*demi mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif dalam Pilkada. Sebab hak memilih dan dipilih, adalah hak konstitusional setiap warga negara*”.
- T Namun persoalan dinasti politik, tidak bisa kita pandang **hitam-putih**, atau secara normative saja. *Adagium* : kendatipun tidak melanggar norma, ada prinsip yang harus kita pelihara. *Tanggung jawab siapa?*

Situasi di Indonesia

(Lanjutan....)

- T Dalam kurun waktu **2010-2014**, terdapat **61 daerah** menerapkan praktik politik dinasti (Djohermansyah Djohan, mantan Dirjen Otda Kemendagri).
- T Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan signifikan, dan saat ini sudah mencapai **117 daerah** atau sekitar **21 persen** dari jumlah daerah otonom di Indonesia.
- T Setidaknya terdapat 7 dinasti politik yang cukup menyita perhatian publik : **Ratu Atut Chosiyah** di Banten, **Syaukani Hassan Rais** di Kutai Kartanegara, **Atty Suharti** di Cimahi, **Fuad Amin Imron** di Bangkalan, **Sri Hartini** di Klaten, **Yan Anton Ferdian** di Banyuasin, dan terakhir yang menyedot perhatian publik Kaltim adalah **Ismunandar** di Kutai Timur.

Politik Dinasti Di Kalimantan Timur

Klasifikasi Dinasti Politik di Kalimantan Timur

Dalam satu jenis lembaga, namun pada tingkatan berbeda

Beberapa keluarga politik menduduki jabatan dilembaga perwakilan, tapi pada tingkatan yang berbeda (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota)

Lembaga berbeda, tingkatan berbeda

Keluarga politik ini, menduduki jabatan pada jenis lembaga dan tingkatan yang berbeda (Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, atau DPR-RI dan DPD-RI)

Dalam satu wilayah

Kendatipun berada dalam satu wilayah, tetapi memegang jabatan di lembaga yang berbeda (Kepala Daerah dan DPRD).

Politik Dinasti Di Kalimantan Timur

(Lanjutan....)

No.	Wilayah	Aktor	Relasi Kekeluargaan	Jabatan	Partai	Ket.
1.	Kabupaten Kutai Timur	Ismunandar	Suami	Bupati Kutai Timur	Nasdem	Masa jabatan 2016-2021
		Encek UR Fargasih	Istri	Ketua DPRD Kutai Timur	PPP	Masa jabatan 2019-2024
2.	Kota Bontang	Neni Moerniaeni	Ibu	Walikota Bontang	Golkar	Masa jabatan 2016-2021
		Andi Faisal Sofyan Hasdam	Anak	Ketua DPRD Bontang	Golkar	Masa jabatan 2019-2024
3.	Kabupaten Paser	Yusriansyah Syarkawi	Ayah	Bupati Paser	Golkar	Masa jabatan 2016-2021
		Hendra Wahyudi	Anak	Ketua DPRD Paser	PKB	Masa jabatan 2019-2024

Sumber : *diolah dari berbagai sumber.*

Politik Dinasti Di Kalimantan Timur

(Lanjutan....)

No.	Aktor	Relasi Kekeluargaan	Jabatan	Partai	Ket.
4.	Awang Faroek Ishak	Ayah	Anggota DPR-RI	Nasdem	Masa jabatan 2019-2024
	Awang Ferdian Hidayat	Anak	Anggota DPD-RI	-	Masa jabatan 2019-2024
5.	Rudi Mas'ud	Adik	Anggota DPR-RI	Golkar	Masa jabatan 2019-2024*
	Hasanuddin Mas'ud	Kakak	Anggota DPRD Provinsi Kaltim	Golkar	Masa jabatan 2019-2024*
	Rahmad Mas'ud	Kakak	Wakil Walikota Balikpapan	Golkar	Masa jabatan 2016-2021
	Abdul Gafur Mas'ud	Adik	Bupati Penajam Paser Utara	Demokrat	Masa Jabatan 2018-2023

Sumber : *diolah dari berbagai sumber.*

Politik Dinasti Di Kalimantan Timur

(Lanjutan....)

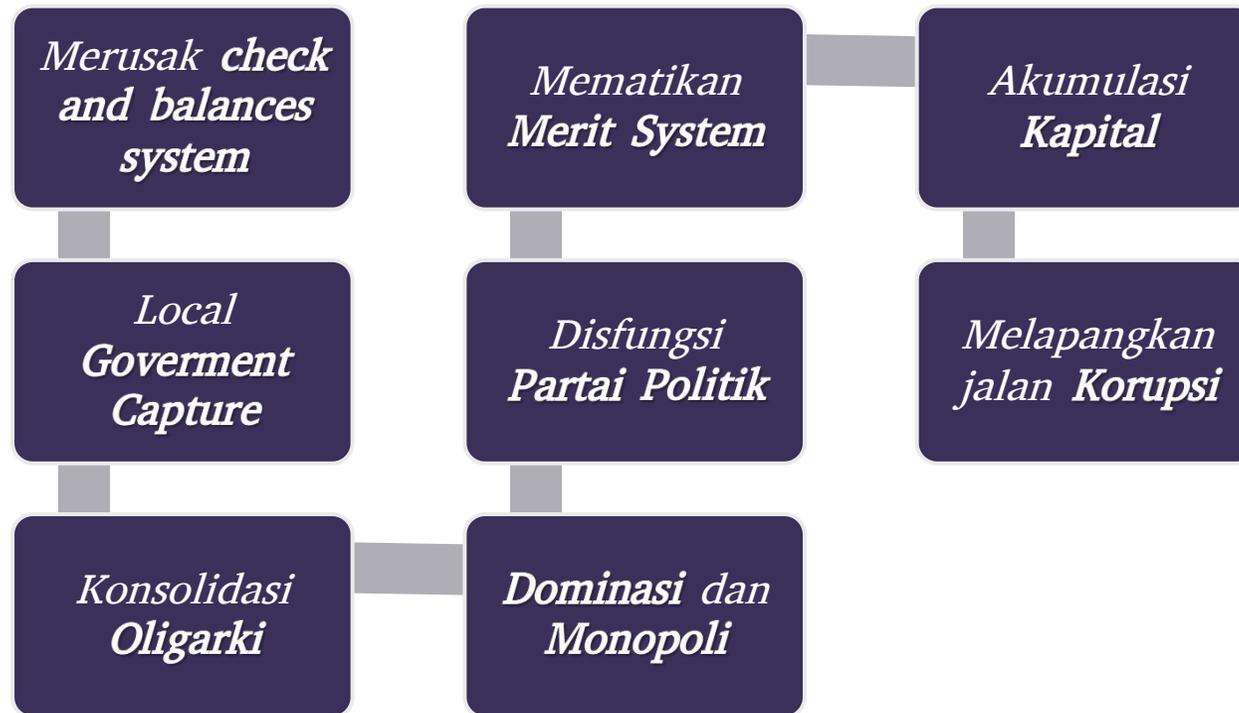
No.	Aktor	Relasi Kekeluargaan	Jabatan	Partai	Ket.
6.	Mahyuddin	Kakak	Anggota DPD-RI	-	Masa jabatan 2019-2024
	Mahyunadi	Adik	Anggota DPRD Provinsi Kaltim	Golkar	Masa jabatan 2019-2024
	Maswar	Adik	Anggota DPRD Kutai Timur	Golkar	Masa jabatan 2019-2024
	Marsidik	Adik	Anggota DPRD Kutai Timur	Golkar	Masa jabatan 2019-2024
7.	Syahrie Jaang	Suami	Walikota Samarinda	Demokrat	Masa jabatan 2016-2021
	Puji Setyowati	Istri	Anggota DPRD Kaltim	Demokrat	Masa Jabatan 2018-2023

Sumber : *diolah dari berbagai sumber.*

Akar Politik Dinasti?

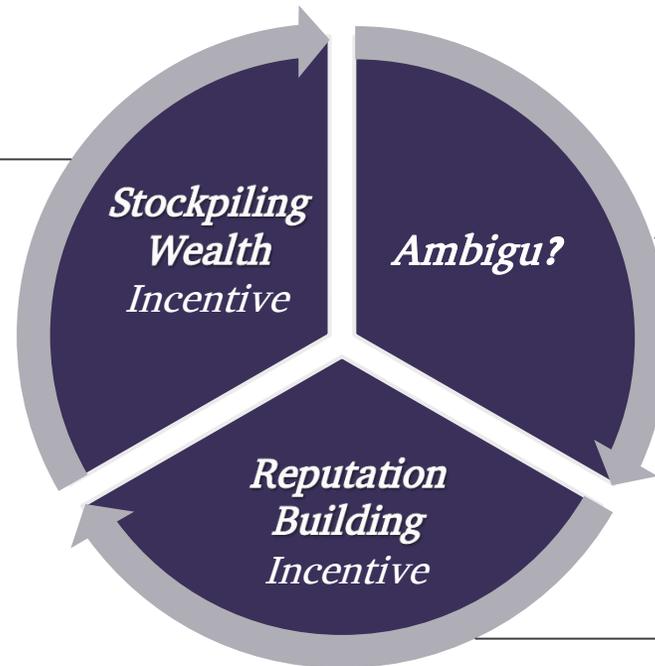
- T Kesadaran politik rakyat yang masih mengambang (*floating mass*) akibat tidak massifnya pendidikan politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik.
- T Kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi **rekrutmen** dan **kaderisasi**.
- T Minimnya kapasitas partai politik dalam **kemandirian keuangan** organisasi.
- T Dinamika politik masih terkonsentrasi hanya kepada **kelompok tertentu** saja.
- T Lemahnya kontrol sosial, sehingga berdampak terhadap **check and balances system**.
- T Masih kuatnya **kultur feodal** dalam tatanan masyarakat kita (relasi patron-client, agent-principal, dan sejenisnya).

Implikasi *Dinasti Politik*



Korupsi *Dan* Dinasti Politik

- Di sisi lainnya, dinasti politik juga sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai insentif menimbun kekayaan (*stockpiling wealth incentive*).
- Namun pada akhirnya, kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaannya, akan berujung kepada akumulasi sumber daya capital.
- Negara-negara dengan prevalensi politik dinasti yang lebih tinggi, rata-rata lebih korup.



Ashikur Rahman (2013), *“Essays on political dynasties: evidence from empirical investigations”*, Hubungan antara korupsi dan dinasti politik, cenderung ambigu secara teoritis.

Satu sisi, dinasti politik akan sangat dipengaruhi oleh insentif pembangunan reputasi (*reputation building incentive*).

Korupsi *Dan* Dinasti Politik

(Lanjutan....)

- T Ernesto Dal Bó *dkk* (2007), dinasti politik akan memberikan efek ketimpangan dalam distribusi kekuasaan politik. Akan terjadi monopoli kekuasaan sebagai upaya melanggengkan dinasti politiknya.
- T Monopoli kekuasaan, berlangsung disemua aspek. Mulai dari penguasaan partai politik, penguasaan jabatan-jabatan strategis birokrasi, hingga penguasaan terhadap oraganisasi kemasyarakatan yang strategis.
- T Monopoli kekuasaan ini mensyaratkan dukungan sumber daya materil atau finansial yang memadai. Teruma untuk memberikan asupan dana operasional kepada mesin-mesin sosial-politik yang dikuasai.
- T Sumber finansial yang paling mudah dijangkau adalah APBD (hibah dan bansos, PBJ, dan anggaran OPD), bisnis perizinan, jual-beli jabatan, dan lainnya.